

BAWASLU KENDARI TEGASKAN NETRALITAS ASN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/1081679/bawaslu-kendari-tegaskan-netralitas-asn>

Isi berita:

KBRN, Kendari : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari Sahinuddin, mengingatkan agar ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk tidak memberikan dukungan langsung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Sahinuddin mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menemukan pelanggaran netralitas ASN di Kota Kendari. Namun kewaspadaan terus dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya berkolaborasi dengan pemerintah kota dengan berpartisipasi dalam rapat internal pemkot untuk mengingatkan pentingnya netralitas dan penegasan sanksi yang akan menjerat bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran. “Jika ada ASN yang melanggar, bisa berimbas pada pidana. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelanggaran seperti politik uang dapat dihukum maksimal 72 bulan,” jelas Sahinuddin. Sahinuddin berharap semua pihak berperan aktif untuk menciptakan proses demokrasi yang baik. “Bawaslu dan KPU harus menjadi pemimpin dalam gerakan membangkitkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1081679/bawaslu-kendari-tegaskan-netralitas-asn> “Bawaslu Kendari Tegaskan Netralitas ASN”, tanggal 29 Oktober 2024.
2. <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/10/31/bawaslu-rekomendasikan-asn-di-kendari-disanksi-bkn/> “Bawaslu Rekomendasikan ASN di Kendari Disanksi BKN”, tanggal 31 Oktober 2024.

Catatan:

Terkait Netralitas ASN dalam Pemilu diatur pada

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 - a. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
 - b. Pasal 12 menyatakan bahwa “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada:
 - a. Pasal 6 huruf n menyatakan bahwa, “ PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;
- b. Pasal 14 menyatakan bahwa, “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- a) menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
 - c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
 - d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
 - e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - f) melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - g) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaarr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
 - h) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
 - i) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

- 2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 5) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.